



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

BUKU-BUKU

Perusahaan perseroan (Persero) dalam perspektif hukum keuangan negara

HAMBRA, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyani Wuri, *Kedudukan Persero Dalam Hubungan Dengan Hukum Publik, Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.
- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*, cetakan kedua, Toko Gunung Agung, Tbk. FT, Jakarta, 2002.
- Apeldoorn L.J.van, *Pengantar Ilmu Hukum (cetakan kedua puluh sembilan)*, Pradnya Paramita, PT, Jakarta, 2001.
- Asshiddiqie Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006.
- Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan, *Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, 2004.
- Budiarto Agus, *Kedudukan Hukum & Tanggung jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, 2002.
- Direktorat Pembinaan BUMN, Direktorat Jenderal Moneter, Departemen Keuangan, *Himpunan Peraturan Badan Usaha Milik Negara*, 1991.
- Jaya Eko, CV, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta, 2007.
- Kansil C.S.T dan Kansil Christine S.T, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Kansil C.S.T dan Kansil Christine S.T, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)* Bagian I cetakan Ketujuh, Pradnya Paramita, PT, Jakarta, 2005.
- Kementerian Negara BUMN, *Perkembangan Sistem Pembinaan BUMN*, Jakarta 2004.
- Matutu H. Mustamin DG, Latief H. Abdul, Mustamin Hj. Hikmawati, Mandat, Del'gasi, Attribusi dan Implementasinya di Indonesia, Penerbit UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2004.
- Prabunara Koperasi Pegawai Kementerian Negara BUMN, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Badan Usaha Milik Negara*, Jakarta, Edisi 2006.
- Samal Hambra, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Badan Usaha Milik Negara*, Biro Hukum dan Humas Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, Jakarta, 2000.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung, 2006.

- Soekanto Soerjono, dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit RajaGrafindo Persaja, PT, Jakarta, 1983.
- Soeria Atmadja Arifin P, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktek, dan Kritik*, Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2005.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996
- Supranoto Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Penerbit Djambatan, Edisi Revisi, Jakarta, 2004.
- Tjandra W. Riawan, *Hukum Keuangan N'gara*, Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.
- Widjaja I.G. Rai, *Hukum Perusahaan – Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, Penerbit Kesaint Blanc, Cetakan Ketiga, Bekasi, 2003.
- Wiyono R, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Yustisia Pustaka, *Himpunan Perundangan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Penerbit Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2006.

MAKALAH, BAHAN SEMINAR, BAHAN DISKUSI, PIDATO

- Arifin Muchtar, *Penegakan Hukum Yang Menyangkut BUMN, Makalah pada Raker Kementerian Negara BUMN*, Bandung, 30 Maret 2006.
- Didu Muhammad Said, *Kekayaan Negara Yang Dipisahkan dan Piutang Negara Dalam Konteks Keuangan Negara*, Jakarta, Juli 2006.
- Hidayat Herman, *Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa BUMN Dalam Rangka Mendorong Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Perum Jasa Tirta II*, 25 Juni 2005
- Kementerian Negara BUMN, *Bahan RUU KMIP*, Jakarta 19 Juni 2007.
- Menteri Badan Usaha Milik Negara, *Keterangan Mewakili Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara di hadapan DPR*, Jakarta, 2 Juli 2002.
- Menteri Keuangan, *Bahan Rapat Kerja Menteri Keuangan dan Komisi XI DPR RI*, Jakarta, 10 Juli 2006.
- Menteri Negara BUMN, *Bahan Masukan Bagi Penyempurnaan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN)*, disampaikan pada Rapat Kerja Menteri Negara BUMN dengan Badan Legislasi DPR-RI, Jakarta, Maret 2006.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Perusahaan perseroan (Persero) dalam perspektif hukum keuangan negara

HAMBRA, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

Buru, Bacelius, Makalah Pembinaan BUMN pada Raker Kementerian Negara
Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari <http://efd.repository.ugm.ac.id/>

BUMN, Bandung, 2006.

Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Telaahan Hukum Terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik Negara Dikaitkan Dengan Kewenangan Pemeriksaan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, April 2006

Sekretaris Kementerian Negara BUMN, *Bahan CEO Gathering*, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, 27 Maret 2006.

Sekretaris Kementerian Negara BUMN, *Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 3 September 2008*, Jakarta, 2008.

Sekretariat Komisi V DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, Jakarta, 2003

Soeria Atmadja Arifin P, *Implikasi Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Badan Usaha Milik Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan*, Pusat Kajian dan Konsultasi Keuangan Publik (PK3P).

UUD 1945, UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, KEPUTUSAN PRESIDEN, DAN INSTRUKSI PRESIDEN.

Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahannya.

Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W) tercantum dalam Stbl. 1925 Nomor 448 terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.

Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Perusahaan perseroan (Persero) dalam perspektif hukum keuangan negara

HAMBRA, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan
(Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan
Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan
Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan,
Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan, selaku Pemegang Saham atau
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan
kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan,
Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) atau pemegang saham pada Perusahaan Perseroan (Persero)
dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara
Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan
Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan,
Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) atau pemegang saham pada Perusahaan Perseroan (Persero)
dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara
Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan
Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan,
Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan
(Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan)
kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan,
Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan
(Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan)
kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi
Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik
Negara.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Perusahaan perseroan (Persero) dalam perspektif hukum keuangan negara

HAMBRA, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998.

Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999.

Keputusan Presiden Nomor 10/M Tahun 2000.

Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2000.

Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001.

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004

Keputusan Presiden Nomor 31/M Tahun 2007

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara ke dalam Tiga Bentuk Usaha Negara.